

KH. Yusuf Supendi [Anggota Komisi III DPR RI]

DAHULUKAN BEKERJA DISIPLIN, JANGAN BEKERJA "DISELIPIN"

KONDISI masyarakat saat ini masih didera dengan berbagai bentuk kemiskinan. Ditambah lagi anggota masyarakat yang minim mengenyam pendidikan atau jauh dari pendidikan. Kondisi ini membuat situasi keamanan menjadi rawan, terjadi kerusuhan dan kecacauan. Masyarakat mudah tersulut dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mudah main hakim sendiri dan sebagainya.

Oleh karena itu Polda Metro Jaya perlu meningkatkan kinerjanya. Diantaranya harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Memanfaatkan berbagai potensi. Seperti potensi ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan LSM yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. "Sebab, kondisi masyarakat yang demikian, sedikit saja disulut, maka akan mudah terjadinya kerawanan," ungkap anggota Komisi III DPR RI, KH. Yusuf Supendi.

Contoh konkretnya, kata Yusuf, kasus-kasus sosial yang terjadi di Bogor, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan anggota masyarakat terhadap seorang yang dianggap penganut dan pengamal aliran sesat. Dari kasus tersebut, ternyata diketahui bahwa para pelaku umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Misalnya ada yang hanya berpendidikan sekolah dasar. Kedua, mereka rata-rata dibelit masalah kemiskinan. Mereka hanya menjadi pekerja di masyarakat. Jadi, faktor terjadinya kasus tersebut diantaranya adalah kebodohan dan kemiskinan.

Di bidang pengayoman dan perlindungan masyarakat, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Bogor IV ini menganjurkan supaya Polda Metro Jaya menyiapkan anggaran untuk sosialisasi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

"Perlu kita ketahui, semuanya (anggota forum) adalah manusia biasa, bukan malaikat. Mereka perlu makan, minum, transportasi dan sebagainya. Tidak cukup hanya mengabdikan mereka untuk penanganan masalah-masalah sosial, karena memang kondisi kehi-



dupan mereka masih berat. Kalau dulu-dulu memang memungkinkan, karena kehidupan masyarakat realtif baik. Tapi untuk sekarang ini, cukup berat melakukan sesuatu dengan partisipasi sosial. Oleh karena itu, perlu disiapkan anggaran dari APBD atau APBN," sarannya.

Di sisi lain, ia memandang masih adanya sikap masih tidak baik yang dilakukan oknum anggota Polri. Terutama menyangkut kebiasaan "damai itu indah" atau istilah 86 (baca: delapan enam). "Inilah yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selama kepolisian tidak merubah sikap dan memperbaiki aparatnya terutama terhadap masyarakat bawah, tetap melakukan "damai itu indah" di jalan, maka selama itu pula citra Polisi tidak akan baik di kalangan masyarakat," tandasnya.

Ini, katanya, masalah mentalitas. Mentalitas polisi harus berubah. Sebab sudah melanggar sumpah, sumpah jabatan dan sumpah prajurit. Kalau tidak berubah, citra polisi tidak akan baik.

Anggota parlemen yang juga dosen ini

mengaku pernah menyaksikan fenomena "damai itu indah". Tidak menyangkut dirinya, tapi anggota masyarakat dengan polisi. "Contohnya, saya beberapa kali ke Sukabumi. Karena di sana (Sukabumi) banyak pabrik sehingga banyak kendaraan memuat barang. Dulu, polisi turun ke jalan sendiri memungut uang dari kendaraan itu. Tapi sekarang, polisi memanfaatkan anak-anak (warga) untuk menyetop mobil (truk-truk) dan meminta duitnya. Sedangkan polisi bertindak sebagai broker. Ini merupakan pelanggaran," sergahnya.

MASALAH LALU LINTAS

Permasalahan lalu lintas di Jakarta memang rawan. Saat ini Jakarta berpenduduk sekitar 12 juta. Sedangkan di Jakarta terdapat sekitar 2,5 juta motor dan 2,5 juta kendaraan pribadi roda empat. Jumlah total kendaraan di Jakarta adalah 5 juta. Ini artinya, antara jumlah penduduk dan kendaraan 1:2. Pantas saja kalau jalanan di Jakarta makin semrawut. Sudah jalannya sempit, Pemprov DKI membikin jalur bus way. Semestinya Bus Way dibuat disertai dengan membuat jalan baru. Sementara yang terjadi sekarang, pembangunan bus way dengan cara mengurangi jalan yang sudah ada. Kalau ini yang terjadi, maka jalur bus way lancar, tapi yang lainnya macet. Jadi, perbaikan sistem lalu lintas di DKI jangan bersifat parsial, tapi harus integral.

Saya menghimbau, sebaiknya polisi lalu lintas meertibkan masalah lalu lintas. Bagi mereka (pemakain jalan) yang melakukan kesalahan tidak sengaja, kenapa harus ditindak? Sebaiknya diberi peringatan. Polisi jangan mencari kesalahan orang. Lakukanlah tugas-tugas penegakan sebagai polisi lalu lintas. Polisi lalu-lintas harus mendahulukan disiplin bekerja, ketimbang bekerja "diselipin".

Ia meminta kepada warga masyarakat untuk tidak serta-merta "memberi" polisi ketika distop di jalan. Sebab, ketika distop diduga melanggar, belum tentu pengendara dalam posisi salah. Misalnya seseorang distop karena *voor biden*, padahal pengendara tidak tahu karena tidak melihat. Dalam kondisi tidak tahu dan tidak melihat rambu-rambu, maka pengendara tidak bisa serta-merta disalahkan. "Jangan cepat melakukan "damai itu indah". Sebab, perilaku seperti ini akan merusak citra Polri dan melanggengkan perilaku negatif oknum polisi. Janganlah masyarakat turut memelihara perilaku polisi yang negatif, supaya polisi lekas menjadi baik".

[Rusnohadi/jt-002]